BERKALA PERIKANAN
TERUBUK
Journal homepage: https://terubuk.ejournal.unri.ac.id/index.php/JT
ISSN Printed: 0126-4265
ISSN Online: 2654-2714

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DUMAI DALAM MENJAMIN KEBERLANJUTAN SISTEM MATA PENCAHARIAN (*LIVELIHOOD SYSTEM)* MASYARAKAT NELAYAN

THE DUMAI CITY GOVERNMENT POLICIES IN ENSURING THE SUSTAINABILITY OF THE LIVELIHOOD SYSTEM OF FISHING COMMUNITIES

Muhammad Isnainy Ramadhan[1], Zulkarnaini[2], Darwis[2]
1)Mahasiswa Magister Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau,
2)Dosen Magister Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau, Jl. HR Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru, Panam-Pekanbaru Indonsia 28293.

INFORMASI ARTIKEL

Diterima: 29 Juni 2021
Distujui: 16 July 2021

Keywords:
Dumai City Government, Fishing Community, Impact, Industrial Development, Policy, Socio-Economic

A B S T R A C T

There has been a decrease and increase in the number of fishermen in the last 5 years which is thought to be caused by the development of an industrial area on the coast of Dumai City. This paper aims to determine the socio-economic conditions of the fishing communities adjacent to the Dumai City industrial area, analyze the impact of industrial development on the livelihoods of fishing communities, and analyze the Dumai City Government policies in ensuring the sustainability of the livelihoods of fishing communities. This research was conducted using a survey method with a quantitative approach located in Dumai City on March - April 2021. This study reveals that the positive impact of industrial development in the coastal area of Dumai City is the increased consumption of capture fishery products in Dumai City and the availability of wide employment opportunities according to the level of education required, while the negative impact of industrial development in the coastal area of Dumai City is the increasingly narrow fishermen's catching areas that are in accordance with the type of boat and the type of fishing gear currently used and the occurrence of livelihood shifts. This negative impact can threaten the sustainability of the fishermen's livelihood system in Dumai City because based on the identification of socio-economic conditions, fishermen in Dumai City have lower middle income. Based on the SWOT analysis, the alternative policy that can be carried out by the Dumai City government in ensuring the sustainability of the livelihood system of the fishing community is to carry out a capture fisheries area development program as well as fostering Joint Business Groups with fishermen and the formation of fishermen's cooperatives.

Correspondence Author : m.isnainyramadhan@gmail.com

* *Corresponding author.*
E-mail address: m.isnainyramadhan@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kota Dumai merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Riau, dengan luas Wilayah 1.727,38 Km² dan luas lautan 1.302.40 Km² yang terdiri dari tujuh kecamatan yaitu Dumai Kota, Dumai Barat, Dumai Timur, Dumai Selatan, Bukit Kapur, Sungai Sembilan dan Medang Kampai. Mengacu kepada undang-undang No. 22 tahun 2005 tentang otonomi daerah dimana batas kewenangan pengelolaan Kabupaten/Kota sejauh 4 mil karena nelayan di perairan Kota Dumai biasanya melakukan penangkapan terbatas pada kawasan perairan dengan jarak 2 mil dari pantai sementara kewenangan Kabupaten/Kota sejauh 4 mil dari pantai, agar kegiatan penangkapan tidak hanya terkosentrasi dekat dengan pantai supaya kondisi sumberdayanya dapat berangsur pulih (Sarianto,2017).

Kondisi Perikanan Kota Dumai hampir keseluruhan produksinya berasal dari usaha perikanan laut dengan persentase sekitar 93% dan sisanya pada perikanan budidaya dan lainnya. Dimana produksi perikanan yang diperoleh dari hasil tangkapan tahun 2015–2019 mengalami peningkatan dari 249 Ton menjadi 660 Ton pada tahun 2019 (BPS,2021). Berdasarkan data tersebut, potensi yang besar ini tentu menjadikan sektor perikanan sebagai sektor penting yang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Sektor perikanan tangkap laut memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat, karena hampir 300 Rumah tangga yang bergantung pada sektor ini. Jumlah rumah tangga nelayan di Kota Dumai mengalami penurunan dan peningkatan setiap tahunnya. Diduga hal tersebut terjadi karena ketidakpastian penghasilan yang didapatkan oleh nelayan. Hal ini mengindikasikan bahwa ada sektor usaha lain yang dirasakan lebih baik. Sehingga banyak rumah tangga yang beralih ke sektor lainnya.

Salah satu sektor yang sangat terlihat pada pada daerah pesisir Dumai adalah sektor industri, Sektor Industri memberikan peran penting dalam perkembangan dan pembangunan wilayah di Kota Dumai, yang kemudian menjadi pilihan pemerintah untuk pengembangan wilayah, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan penduduk. Kehadiran sektor industri di Indonesia menambah gairah pembangunan ekonomi suatu wilayah. Kegiatan industri juga memberikan dampak terhadap kondisi fisik, lingkungan, dan sosial. Pada dasarnya keberadaan industri dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi wilayah sekitarnya. Dampak positif cenderung sangat diharapkan dan dampak negatif akan dikendalikan agar tidak memberikan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan.

Industrialisasi di wilayah pesisir Kota Dumai, khususnya di Kecamatan Sungai Sembilan dengan masuknya beberapa perusahaan pengolahan CPO (*Crude Palm Oil)* dan Semen mulai tahun 2005 dirasakan membawa dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat di Kota Dumai. Berkaitan dengan kawasan pesisir dan laut, masyarakat nelayan adalah salah satu komunitas penduduk yang tinggal di wilayah pesisir di Kecamatan Sungai Sembilan. Masyarakat nelayan menggantungkan hidupnya dari sumber daya perikanan dan berhubungan dengan ketahanan pangan sumber perikanan. Akan tetapi, profesi nelayan khususnya nelayan kecil di Kecamatan Sungai Sembilan sangat sensitif dengan perubahan sekitarnya, termasuk perubahan iklim dan perubahan karena adanya industri yang secara langsung dan tidak langsung berdampak terhadap wilayah pesisir dan laut.

Sejak berkembangnya kawasan industri CPO dan Semen di Kecamatan Sungai Sembilan, terjadi perubahan area penangkapan nelayan yang semula bisa menangkap ikan di sepanjang selat rupat bergeser ke arah luar selat rupat. Selain itu telah terjadi tumpahan CPO sebanyak 2 kali yaitu pada Tahun 2014 dan Tahun 2020. Tentunya peristiwa seperti ini berpengaruh terhadap mata pencaharian masyarakat nelayan. Perubahan area penangkapan dan peristiwa tumpahnya CPO memaksa nelayan harus menangkap ikan jauh dari perairan kawasan industry. Namun, kapal < 5GT yang digunakan nelayan tidak mendukung untuk melakukan penangkapan ikan di luar area yang selama ini dimanfaatkan nelayan. Salah satu usaha yang dilakukan nelayan adalah berusaha menambah jumlah kapal motor untuk kegitan tangkap ikan. Meningkatkan jumlah kapal motor yang dilakukan oleh nelayan Kota Dumai belum dapat menjamin keberlangsungan hidup masyarakat nelayan di Kota

Dumai karena masih terjadi kenaikan dan penurunan jumlah masyarakat nelayan di Kota Dumai.

Apabila kondisi seperti ini tidak segera diatasi, maka jumlah masyarakat nelayan Kota Dumai akan semakin berkurang. Produksi perikanan tangkap Kota Dumai menjadi turun dari tahun ke tahun. Dibutuhkan kebijakan yang tepat untuk menjamin keberlanjutan mata pencaharian masyarakat nelayan ditengah maraknya pembangunan sektor industry di Kota Dumai. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi social ekonomi nelayan yang berdampingan dengan kawasan pembangunan industry Kota Dumai, menganalisis dampak pembangunan industry terhadap masyarakat Nelayan di Kota Dumai, dan menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Dumai dalam menjamin system mata pencaharian masyarakat nelayan di Kota Dumai. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengangkat judul penelitian "Kebijakan Pemerintah Kota Dumai dalam Menjamin Keberlanjutan Sistem Mata Pencaharian (*Livelihood System*) Masyarakat Nelayan"

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di wilayah pesisir Kota Dumai, Provinsi Riau. Lokasi tersebut dipilih secara sengaja (*purposive*) dikarenakan diwilayah pesisr Kota Dumai terdapat masyarakat yang bermatapencaharian sebagai nelayan. Kegiatan penelitian dilaksanakan pada Bulan April 2021 hingga Mei 2021. Dilaksanakan dengan metode survei mengunakan pendekatan kuantitatif sesuai dengan analisis datanya. Sumber data penelitian dibedakan menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono, 2015). Metode penelitian ini digunakan untuk mengetahui lebih jauh kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan yang ada di Kota Dumai, menganalisis dampak pembangunan industry terhadap nelayan serta menganalisis kebijakan pemerintah dalam menjamin keberlanjutan mata pencaharian nelayan.

Populasi dalam penelitian ini adalah Nelayan yang berada di Kota Dumai berjumlah 296 orang dengan jenis alat tangkap dan area penangkapan yang berbeda dan tergabung ke dalam Kelompok Usaha Bersama yang terdata di Dinas Perikanan Kota Dumai. Berdasarkan jumlah nelayan tersebut, maka jumlah responden dari nelayan dikelompokkan berdasarkan kelompok usaha bersama nya. Teknik Sampling yang digunakan yaitu *Cluster Sampling* dengan sampel yang dipilih sesuai dengan Kelompok Usaha Bersama yang ada. Kelompok nelayan di Kota Dumai berjumlah 29 Kelompok dan yang aktif melakukan kegiatan penangkapan dan pelaporan adalah 22 Kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 10-16 orang/kelompok. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti (Arikunto, 2010). Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Arikunto (2010), jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Berdasarkan jumlah kelompok tersebut, maka sampel yang dipilih yaitu sebanyak 29 orang yang berasal dari kelompok yang berbeda-beda. Selain itu, diperlukan juga keterangan dari pemerintah setempat yang dipilih secara *purposive sampling* yaitu teknik penarikan sample secara subjektif yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan, baik dari aparatur pemerintah, maupun masyarakat secara luas yang dianggap representative dan dapat memberikan informasi yang valid yang berhubungan dengan penelitian.

Analisis Data

Tujuan kesatu dan tujuan kedua dijawab menggunakan analisis deskriptif kuantitatif untuk mendapatkan penjelasan dalam bentuk angka dan data kemudian dipaparkan dalam bentuk tabel dan grafik. Menurut Sugiyono (2012) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Fungsi statistik deskriptif antara lain mengklasifikasikan suatu data variabel berdasarkan

kelompoknya masing-masing dari semula belum teratur dan mudah diinterpretasikan maksudnya oleh orang yang membutuhkan informasi tentang keadaan variabel tersebut.

Tujuan ketiga dijawab menggunakan analisis SWOT untuk mendapatkan alternatif kebijakan yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai. Rangkuti (2013) mengatakan bahwa analisis SWOT adalah suatu cara mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka merumuskan strategi perusahaan/organisasi. Analisis SWOT mempertimbangkan faktor lingkungan internal kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknesses). Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. diresmikan sebagai Kota pada 20 april 1999, dengan UU No. 16 Tahun 1999. Pada awal pembentukan, Kota Dumai hanya terdiri atas 3 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk hanya 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km2. Pemekaran kecamatan terjadi pada tahun 2000-2001 menjadikan Kota Dumai memiliki 5 Kecamatan. Kemudian pada tahun 2013 jumlah kecamatan dimekarkan menjadi 7 kecamatan. Kecamatan-kecematan yang ada di Dumai yaitu antara lain : Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Kota, dan Kecamatan Dumai Selatan.

Sektor Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dikelola oleh Dinas Perikanan (DISKAN) Kota Dumai. Dinas Perikanan Kota Dumai sebagai salah satu organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Dumai di bidang kelautan dan perikanan mempunyai tugas, Fungsi dan Uraian Fungsi sebagai berikut: Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang kelautan dan perikanan.

Kondisi Sektor Perikanan Kota Dumai

Dumai dalam Angka Tahun 2020 menyebutkan bahwa Produksi perikanan di Kota Dumai sebagian besar berasal dari perikanan laut. Data produksi dan nilai perikanan dikumpulkan dari Dinas Perikanan Kota Dumai. Pada tahun 2020 data yang bersumber Dinas Perikanan Kota Dumai tersebut menunjukkan bahwa dari sejumlah 774.791 kg total produksi ikan, sebanyak 585.791 kg atau 75,61 persen merupakan hasil perikanan laut dan 189.000 kg (24,39 persen) adalah hasil perikanan kolam, tambak dan keramba.

Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, bahwa hasil perikanan di Kota Dumai sebagian besar bersumber dari sector perikanan tangkap atau perikanan laut. Hasil perikanan laut Kota Dumai didapatkan dari masyarakat nelayan yang tersebar diseluruh kecamatan se Kota Dumai. Adapun jenis ikan yang merupakan hasil tangkapan masyarakat nelayan Kota Dumai antara lain adalah Tenggiri, Parang-parang, Senangin, Kakap, Gulama, Lomek, Biang, Pari, Bawal, Gonjeng, dan Udang. Berikut ini merupakan data hasil perikanan laut kota dumai menurut jenis komoditasnya.

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kota Dumai

1. Keragaman Pekerjaan

Keragaman pekerjaan adalah suatu keadaan yang dimiliki oleh sebuah keluarga dimana kepala keluarga, dan seluruh anggota keluarga yang termasuk usia produktif untuk melakukan usaha memiliki

sebuah pekerjaan. Untuk menilai keragaman pekerjaan sebuah rumahtangga maka indicator yang digunakan adalah pekerjaan sampingan bagi kepala rumah tangga, pekerjaan isteri yang ikut bekerja dan anggota yang termasuk usia kerja (Ishak,2016).

Nelayan di Kota Dumai memiliki pekerjaan yang cukup beragam. Terdiri dari 2 jenis pekerjaan yaitu pekerjaan utama sebagai nelayan dan mata pencaharian alternatif. Pekerjaan utama nelayan berdasarkan jenis alat tangkapnya dikelompokkan menjadi 4 jenis yaitu Nelayan Jaring, Nelayan Pengerih, Nelayan Sondong, dan Nelayan Rawai. Mata pencaharian alternatif nelayan di Kota Dumai dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu Mata pencaharian alternatif dibidang perikanan dan mata pencaharian alternatif non perikanan. Sebagian besar nelayan di Kota Dumai merupakan nelayan jarring. Sedangkan mata pencaharian alternatif yang paling mendominasi pada nelayan yaitu mata pencaharian alternatif non perikanan seperti buruh tani, buruh pabrik, dan tukang.

2. Aspek Kesehatan

Aspek Pendidikan pada nelayan di Kota Dumai dinilai berdasarkan pada kesadaran nelayan dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan yang dilakukan oleh nelayan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa sebagian besar nelayan di Kota Dumai telah memiliki kartu BPJS Kesehatan dan memanfaatkannya saat berobat di fasilitas kesehatan terdekat.

Hal ini disebabkan karena adanya pelayanan kesehatan gratis sehingga masyarakat sudah tidak ragu untuk mengunjungi dan menggunakan fasilitas puskesmas. Pada kajian social diatas dapat dilihat bahwa kajian social masih kurang ini dapat dilihat dari kergaman pekerjaan, akses pendidikan, dan akses kesehatan terutama pada aspek kesehatan. Masalah kesehatan tidak lepas dari aspek sosial, ekonomi dan budaya.

3. Aspek Pendidikan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan nelayan di Kota Dumai, diketahui bahwa tingkat pendidikan nelayan di Kota Dumai masih tergolong rendah. Dari 29 Responden pada penelitian ini, didapatkan data bahwa 10 orang dengan pendidikan terakhir SMA, 7 orang responden dengan pendidikan terakhir SMP, dan 12 orang responden dengan pendidikan terakhir SD. Sedangkan tingkat pendidikan anggota keluarga responden yaitu istri dan anak, istri responden dengan pendidikan terakhir SMA sebanyak 5 orang, istri responden dengan pendidikan terakhir SMP sebanyak 13 orang, dan istri responden dengan pendidikan terakhir SD berjumlah 11 orang (Tabel 4.1).

Tabel. 4.1. Data Tingkat Pendidikan Rumah Tangga Nelayan

No	Subjek	Pendidikan Terakhir						Total	
		SD	%	SMP	%	SMA	%	Jlh	%
1	RESPONDEN	12	41,4%	10	34,5 %	7	24,1 %	29	100%
2	ISTRI RESPONDEN	11	38,0%	13	44,9 %	5	17,1 %	29	100%

Sumber : Data Primer Penelitian

Hal ini disebabkan rendahnya perekonomian nelayan. Hasil yang mereka dapat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga nelayan tidak terlalu memikirkan pendidikan yang lebih baik. Tetapi tingkat pendidikan anaknya yang diharapkan oleh nelayan telah mengalami perubahan dimana nelayan mengharapkan tingkat pendidikan anaknya yaitu paling rendah tingkat SMP dan paling tinggi yaitu Sarjana.

4. Tingkat Pendapatan

Pendapatan adalah hasil dari kegiatan yang diperoleh dalam berusaha baik berupa uang maupun barang dimana barang tersebut dihargai dengan nilai uang sehingga dapat dipergunakan untuk

keperluan hidup. Sumber pendapatan dari nelayan yaitu pendapatan dari hasil bekerja sebagai nelayan.

Untuk mengetahui sumber pendapatan nelayan dari hasil tangkapan dapat dilihat pada tabel 4.2 tentang Data Pendapatan Nelayan perbulan berdasarkan jenis alat tangkap. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pendapatan nelayan jaring memiliki pendapatan rata-rata Rp 2.000.000, sampai dengan Rp 3.000.000, perbulan. Nelayan Pengerih memiliki pendapatan rata-rata Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000 perbulan. Sedangkan nelayan rawai dan sondong memiliki pendapatan rata-rata sebesar Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 perbulan (Tabel 4.2).

Berdasarkan data pada Tabel 4.2 diketahui bahwa sebagian besar nelayan di Kota Dumai memiliki pendapatan cukup baik. Tabel tersebut diperoleh dari hasil wawancara tentang penghasilan yang didapat dikurangi dengan biaya operasional saat melakukan kegiatan penangkapan.

Tabel 4.2. Data Pendapatan nelayan perbulan berdasarkan jenis alat tangkap

No	Jenis Alat Tangkap	Pendapatan Rata-Rata/Bulan	Keterangan
1	Nelayan Jaring	Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000	
2	Nelayan Pengerih	Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000	
3	Nelayan Sondong	Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000	
4	Nelayan Rawai	Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000	

Sumber : Data Primer Penelitian

Dampak Pembangunan Industri terhadap Masyarakat Nelayan di Kota Dumai

Menurut Banowati (2014) Kehadiran industry di Indonesia merupakan peningkatan signifikan bagi pengembangan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Indonesia. Pembangunan industry di suatu daerah dapat mempengaruhi kondisi social ekonomi masyarakat setempat. Industri di suatu daerah dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar kawasan industry.

Kota Dumai merupakan kawasan pengembangan industry di Provinsi Riau. Lokasi yang sangat strategis menyebabkan Kota Dumai diincar oleh investor sebagai tempat pengembangan industry berupa pengolahan CPO dan Semen. Kota Dumai berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2019 memiliki 3 kawasan industry yaitu Kawasan Industri Sungai Sembilan, Kawasan Industri Pelintung, dan Kawasan Industri Bukit Kapur. Kawasan Industri Sungai Sembilan dan Kawasan Industri Pelintung dibangun di kawasan pesisir Kota Dumai.

Hadirnya kawasan industry di kawasan pesisir dapat mempengaruhi kehidupan social ekonomi masyarakat setempat. Industri dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi sector ekonomi masyarakat pesisir. Salah satu dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar adalah terbukanya lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat. Sedangkan dampak negatif dari hadirnya industry di wilayah pesisir salah satu nya yaitu penurunan penghasilan bagi masyarakat yang terbiasa menggantungkan hidup pada sumberdaya perairan (Banowati, 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat nelayan di Kota Dumai, dan berdasarkan hasil observasi terhadap kegiatan dan hubungan masyarakat nelayan dengan pihak perusahaan, didapatkan informasi dampak pembangunan kawasan industri di wilayah pesisir Kota Dumai dampak positif diantaranya yaitu meningkatnya konsumsi hasil perikanan tangkap di Kota Dumai menurut 14 orang responden, tersedianya lapangan pekerjaan bagi rumah tangga nelayan menurut 10 orang responden, membaiknya infrastruktur daerah seperti transportasi dan layanan kesehatan menurut 5 orang responden. Sedangkan untuk dampak negatife sebagian besar responden menyebutkan Semakin sempitnya area penangkapan nelayan yang sesuai dengan kondisi kapal dan jenis alat tangkap menurut 12 orang responden, Berkurangnya hasil tangkapan nelayan akibat dari limbah pabrik yang mengalir ke perairan menurut 11 orang responden, dan Terjadinya peralihan mata pencaharian menurut 6 orang responden (Tabel 4.3).

Tabel 4.3. Dampak pembangunan industri terhadap nelayan di Kota Dumai

No	Dampak	Jumlah Responden	Keterangan
Dampak Positif			
1	Meningkatnya konsumsi hasil perikanan tangkap di Kota Dumai	14	
2	Tersedianya lapangan pekerjaan bagi rumah tangga nelayan	10	
3	Membaiknya infrastruktur daerah seperti transportasi dan layanan kesehatan	5	
Jumlah		29	
Dampak Negatif			
1	Semakin sempitnya area penangkapan nelayan yang sesuai dengan kondisi kapal dan jenis alat tangkap nelayan	12	
2	Berkurangnya hasil tangkapan nelayan akibat dari limbah pabrik yang mengalir ke perairan	11	
3	Terjadinya peralihan mata pencaharian	6	
Jumlah		29	

Sumber : Data Primer Penelitian

Kebijakan Pemerintah Kota Dumai dalam Menjamin Keberlanjutan Sistem Mata Pencaharian Masyarakat Nelayan

1. Kebijakan yang telah dilaksanakan

Pemerintah Kota Dumai telah melaksanakan beberapa kebijakan berupa peraturan maupun program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nelayan. Salah satunya yaitu Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Perikanan Kota Dumai telah memberlakukan Kebijakan terhadap Kelompok Usaha Bersama Nelayan Kota Dumai. Melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan terhadap KUB Nelayan yang ada di Kota Dumai. Beberapa kebijakan yang pernah diberlakukan antara lain sebagai berikut :

1. Menyalurkan BBM subsidi bagi nalayan yang terdaftar di KUB dan memiliki kartu KUSUKA (Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan). Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perikanan Kota Dumai, penyaluran BBM bersubsidi dilakukan setiap hari di PPI Kota Dumai melalui SPBU Nelayan. SPBU khusus nelayan di Kota Dumai berjumlah 3 unit dan menyalurkan 1.000 liter per hari. Namun pada pelaksanaannya, tidak semua nelayan Kota Dumai yang membeli minyak bersubsidi dari SPBU Nelayan tersebut dikarenakan akses menuju ke lokasi SPBU masih relatif jauh dari tempat tinggal nelayan.
2. Mengeluarkan peraturan berupa surat edaran dari Dinas Perikanan Kota Dumai untuk mengatur nelayan yang boleh mendaratkan ikan di PPI Dumai adalah Nelayan yang memiliki KUSUKA Dumai dan terdaftar di data nelayan Kota Dumai. Surat Edaran dari Dinas Perikanan yang dimaksud seperti batas-batas kegiatan penangkapan ikan oleh nalayan di perairan Selat Rupat, dan Surat Edaran tentang Proses pengurusan Izin usaha nelayan. Namun, sampai saat ini belum ada bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota yang mendukung program pemerintah pusat dalam PermenKP No 18 Tahun 2012 tentang Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di Kota Dumai.

3. Menyalurkan bantuan berupa alat tangkap dan kapal motor bagi KUB Nelayan yang telah dibentuk minimal 2 Tahun terakhir yang aktif melakukan kegiatan dan menyampaikan laporan. Bantuan alat tangkap berupa jaring bagi kelompok nelayan sebanyak 10 keping per orang dan setiap kelompok berjumlah 10 orang dilakukan pada Tahun 2018 dan pada Tahun 2019 pemerintah menyalurkan bantuan berupa 1 buah kapal motor 5 GT. Namun bantuan kapal motor tersebut belum dapat dioperasikan secara maksimal oleh nelayan.
4. Mengupayakan dana DAK Pusat untuk mengembangkan perikanan tangkap di Kota Dumai. Membangun perumahan bagi nelayan di daerah yang akan dijadikan kawasan minapolitan perikanan tangkap Kota Dumai. Perumahan tersebut berjumlah 40 unit pada Tahun 2014 dan sampai saat ini masih dimanfaatkan oleh nelayan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung dilapangan, kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Perikanan Kota Dumai yang tersebut diatas telah dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan. Namun terdapat beberapa kendala yang terjadi diantaranya yaitu:

1) Akses untuk memanfaatkan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan di Kota Dumai masih berada jauh dari lokasi tempat tinggal nelayan
2) Masih banyak terdapat masyarakat nelayan dari luar Kota Dumai yang mengambil kesempatan atas kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan pemerintah Kota Dumai misalnya masyarakat nelayan Rupat Kabupaten Bengkalis yang ikut membeli BBM bersubsidi di TPI Dumai.

2. Alternatif Kebijakan Pemerintah Kota Dumai dalam Menjamin Keberlanjutan Sistem Mata Pencaharian Nelayan

1. Analisis Faktor Internal

Faktor internal yang menjadi kekuatan Pemerintah dalam menjamin keberlangsungan Mata Pencaharian masyarakat nelayan adalah sebagai berikut (Tabel 4.4)

Tabel 4.4. Matriks Analisis Faktor Internal

No	Faktor Inetnal	Bobot	Nilai	Skor
	Kekuatan			
1	Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	0,17	4	0.68
2	Ketersediaan Fasilitas penunjang usaha perikanan tangkap	0,14	3	0.42
3	Adanya kelompok nelayan yang aktif melakukan kegiatan penangkapan ikan	0,12	3	0.36
4	Dukungan dari Kebijakan pemerintah berupa program dan peraturan	0,10	3	0.30
	Subjumlah			1.76
	Kelemahan			
1	Alat penangkapan ikan yang kurang memadai	0,14	3	0.42
2	Penggunaan teknologi nelayan masih sangat sederhana	0,13	3	0.39
3	Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat nelayan	0,10	2	0.20
4	Program pemerintah tidak tepat sasaran	0,10	2	0.20
	Subjumlah			1.21
		1,00		2.97

2. Analisis Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yang menjadi kekuatan Pemerintah dalam menjamin keberlanjutan Mata pencaharian masyarakat nelayan adalah sebagai berikut (Tabel 4.5)

Tabel 4.5. Matriks Analisis Faktor Eksternal

No	Faktor Eksternal	Bobot	Nilai	Skor
Peluang				
1	Konsumsi ikan masyarakat semakin meningkat	0,18	4	0.72
2	Rencana pembangunan kawasan perikanan tangkap	0,17	3	0.51
3	Akses transportasi Dumai – Pekanbaru telah beroperasi	0,16	3	0.48
Subjumlah				1.71
Ancaman				
1	Penurunan kualitas perairan oleh limbah masyarakat dan pabrik	0,18	3	0.54
2	Harga BBM yang semakin meningkat	0,16	3	0.48
3	Meningkatnya kebutuhan hidup nelayan	0,15	2	0.30
Subjumlah				1.32
	1,00			3.03

3. Matriks Analisis SWOT

Berdasarkan hasil analisis factor-faktor internal dan factor eksternal diatas , maka dapat dilakukan penjumlahan skor dengan hasil Strategi SO memiliki skor paling besar yaitu 3,47, Strategi ST dengan jumlah skor 3,08, Strategi WO dengan skor 2,92, sedangkan skor paling rendah berada pada Strategi WT dengan skor 2,53 (Tabel 4.6)

Berdasarkan hasil Analisis SWOT tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan yang seharusnya dilakukan Pemerintah Kota Dumai dalam menjamin keberlangsungan mata pencaharian masyarakat nelayan adalah dengan memaksimalkan semua kekuatan dan memanfaatkan semua peluang.

Adapun kebijakan-kebijakan yang dapat ditemukan pada hasil analisis SWOT diatas yaitu Peningkatan Produksi hasil perikanan dan kelautan, melaksanakan program pembangunan kawasan perikanan tangkap, pembinaan kelompok usaha bersama dan pembentukan koperasi nelayan, dan perluasan target pasar hingga keluar daerah Kota Dumai (Tabel 4.7).

Tabel 4.6. Matriks Skoring Faktor IFAS dan EFAS

	Kekuatan	Kelemahan
Peluang	Strategi SO 1.76 + 1.71 = 3.47	Strategi WO 1.21 + 1.71 = 2.92
Tantangan	Strategi ST 1.76 + 1.32 = 3.08	Strategi WT 1.21 + 1.32 = 2.53

4. Alternatif Strategi

a. Strategi SO

Strategi SO sangat dominan dalam upaya mempertahankan keberlangsungan kegiatan nelayan. Pilihan kebijakan yang dapat diambil berdasarkan strategi SO adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi Hasil Perikanan dan Kelautan

Produksi hasil perikanan dan kelautan di Kota Dumai harus lebih ditingkatkan karena kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi ikan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan Produksi Hasil Perikanan dan Kelautan Kota Dumai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kota Dumai sehingga mata pencahrian masyarakat nelayan tetap dapat berlangsung.

2. Melaksanakan program pembangunan kawasan perikanan tangkap

Kawasan perikanan tangkap Kota Dumai sudah menjadi wacara pada tahun 2010 yang

dituangkan dalam PermenKP No 12 Tahun 2010. Wacana ini harus dapat dilaksanakan dengan baik agar masyarakat nelayan di Kota Dumai mendapatkan perlindungan yang nyata berupa kawasan khusus sebagai tempat nelayan mencari nafkah. Hal ini menurut peneliti dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan dapat mempertahankan eksistensi nelayan di Kota Dumai.

3. Pembinaan kelompok usaha bersama dan pembentukan Koperasi Nelayan

Dalam rangka memperbaiki taraf hidup dan memberi peluang bagi keluarga nelayan kecil ke arah kehidupan yang sejahtera, menurut Rahayuningsih (2017) ada dua cara yang dapat dilakukan oleh keluarga nelayan kecil, pertama dengan cara mendorong nelayan kecil (tradisional) menjadi nelayan modern, kedua, menfasilitasi nelayan kecil agar lebih berdaya dan mempunyai kemampuan penyangga ekonomi keluarga yang rentan terhadap krisis ekonomi. Pilihan mana yang diambil dari dua jalan di atas, sudah barang tentu sangat tergantung kepada kemampuan sumber daya pemerintah dan sumber kondisi internal nelayan tradisional yang bersangkutan.

4. Perluasan target pasar hingga ke luar Kota Dumai

Target pasar yang semakin luas akan meningkatkan tingkat permintaan terhadap hasil tangkap nelayan. Dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap hasil tangkap nelayan, dapat menimbulkan keseriusan nelayan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Menurut Rahayuningsih (2017) Pencapaian dalam memenuhi permintaan pasar merupakan salah satu bentuk perkembangan positif suatu usaha produksi.

Tabel 4.7. Matriks Analisis SWOT Interaksi IFAS-EFAS

	Strength	Weakness
	1. Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 2. Ketersediaan Fasilitas penunjang usaha perikanan tangkap 3. Adanya kelompok nelayan yang aktif melakukan kegiatan penangkapan ikan 4. Dukungan dari Kebijakan pemerintah berupa program dan peraturan	1. Alat penangkapan ikan yang kurang memadai 2. Penggunaan teknologi nelayan masih sangat sederhana 3. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat nelayan 4. Program pemerintah tidak tepat sasaran
Opportunities 1. Konsumsi ikan masyarakat semakin meningkat 2. Rencana pembangunan kawasan perikanan tangkap 3. Akses transportasi Jalan Tol Dumai – Pekanbaru telah beroperasi	1. Peningkatan Produksi Hasil Perikanan dan Kelautan 2. Melaksanakan program pembangunan kawasan perikanan tangkap 3. Pembinaan kelompok usaha bersama dan pembentukan Koperasi Nelayan 4. Perluasan target pasar hingga ke luar Kota Dumai	1. Melaksanakan program peremajaan API 2. Peningkatan Teknologi dan pengetahuan nelayan
Threat 1. Penurunan kualitas perairan oleh limbah masyarakat dan pabrik 2. Harga BBM yang semakin meningkat 3. Meningkatnya kebutuhan hidup nelayan	1. Pembuatan regulasi tentang area penangkapan ikan dan regulasi tentang limbah pabrik dan masyarakat 2. Pemberian BBM bersubsidi bagi nelayan Kota Dumai	1. Melaksanakan penyuluhan bagi nelayan tentang area penangkapan yang jauh dari dampak limbah 2. Penyuluhan tentang pengelolaan keuangan nelayan

b. Strategi WO (Weakness-Opportunities)

Pilihan kebijakan berdasarkan strategi WO adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan program peremajaan API
2. Peningkatan Teknologi dan pengetahuan nelayan

c. Strategi ST (Strength-Threat)

Pilihan kebijakan berdasarkan strategi ST adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan regulasi tentang area penangkapan ikan dan regulasi tentang limbah pabrik dan masyarakat
2. Pemberian BBM bersubsidi bagi nelayan Kota Dumai

d. Strategi WT (Weakness-Threat)

Pilihan kebijakan berdasarkan strategi WT adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyuluhan bagi nelayan tentang area penangkapan yang jauh dari dampak limbah
2. Penyuluhan tentang pengelolaan keuangan nelayan

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penlitian ini maka dapat disimpulkan bahwa

1. Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat nelayan di Kota Dumai dilihat dari Aspek Keragaman Pekerjaan, nelayan Kota Dumai memiliki alat tangkap dan mata pencaharian alternatif yang beragam. Dilihat dari Aspek Pendidikan, nelayan Kota Dumai memiliki tingkat pendidikan yang tergolong rendah. Pada aspek kesehatan, nelayan Kota Dumai memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam penggunaan BPJS Kesehatan. Sedangkan dari Tingkat Pendapatan, nelayan Kota Dumai memiliki rata-rata pendapatan menengah kebawah.
2. Dampak Positif dari Pembangunan Pabrik industry bagi Masyarakat Nelayan Kota Dumai adalah Meningkatnya komsumsi hasil perikanan tangkap di Kota Dumai karena jumlah penduduk semakin banyak, Sedangkan dampak negative nya yaitu : Semakin sempitnya area penangkapan nelayan yang sesuai dengan kondisi kapal dan jenis alat tangkap nelayan dan terjadi peralihan mata pencaharian.
3. Berdasarkan hasil analisis SWOT tentang Kebijakan Pemerintah Kota Dumai dalam Menjamin Keberlanjutan Mata Pencaharian Masyarakat nelayan maka dapat diambil alternative kebijakan berupa melaksanakan program pembangunan kawasan perikanan tangkap serta melakukan pembinaan Kelompok Usaha Bersama nelayan dan pembentukan koperasi nelayan.

Saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Dumai diharapkan agar dapat meningkatkan perhatian kepada Nelayan sebagai penyumbang produksi perikanan terbesar di Kota Dumai karena hasil produksi perikanan di Kota Dumai sebagian besar berasal dari sektor perikanan tangkap.
2. Diharapkan adanya penelitian lebih mendalam tentang kelayakan usaha perikanan tangkap di Kota Dumai dan pembangunan perikanan tangkap di Kota Dumai.

5. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Badan Pusat Statistik, 2021. *Dumai Dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik Kota Dumai.

Banowati. Eva, 2014. *Geografi Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Ombak

Dinas Perikanan Kota Dumai, 2021. *Laporan Tahunan Dinas Perikanan Kota Dumai*. Kota Dumai. Provinsi Riau.

Ishak,2016.*Kajian Sosial Ekonomi Nelayan yang Bermukim di Pesisir Pantai*. Agrovital, Vol 1, No 1

PerMen KP No 12 Tahun 2010 *Tentang Kawasan Minapolitan. Jakarta : JDIH*

Rangkuti, Freddy. 2013. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI.* Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Rahayuningsih, Yunia. 2017. *Dampak Keberadaan Industri Semen Terhadap Sistem Mata Pencaharian (Livelihood System) Nelayan Bayah*. Banten :BPPD.

Sarianto, D., Simbolon, D., And Wiryawan, B. 2017. *Sebaran Daerah Penangkapan Alat Tangkap Sondong Di Selat Rupat Perairan Kota Dumai*. Jurnal Ilmu-ilmu perikanan. Vol 14

Sugiyono,2014. *Memahami Penelitian Kualitatif* , Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang No. 16 Tahun 1999 *Tentang Pemekaran Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau*